

STUDI NEGOSIASI KULTURAL YANG MENDAMAIKAN ANTARETNIK DAN AGAMA DI KOTA TANJUNGPINANG

Silfia Hanani

LAIN Bukittinggi

silfia_hanani@yahoo.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara multi-etnik, ras, agama, suku dan seterusnya. Keberagaman ini dapat memicu ketidakharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan bisa mengakhiri sejarah suatu bangsa. Hal ini bisa dilihat dari konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, dibutuhkan kajian-kajian bangunan toleransi lokalitas yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Tradisi-tradisi lokalitas itu menjadi satu kekhawatiran dalam membangun keharmonisan dalam masyarakat yang multi-etnis, agama, ras tersebut. Konstruksi-konstruksi keharmonisan ini bisa dilihat dari praktik toleransi lokalitas etnik Melayu dan Cina di Kota Tanjungpinang. Keharmonisan itu dibangun oleh negosiasi-negosiasi kultural yang sudah ditradisikan secara langsung atau tidak langsung. Tradisi-tradisi kultural lokalitas itu patut dijaga dan dikembangkan secara terus-menerus sehingga negara yang dihuni oleh keberagaman ini bisa menemukan model toleransi sesuai dengan lokalitas-lokalitasnya sendiri karena dalam lokalitas yang dimiliki itu ada kearifan yang bisa menyatukan dan berguna bagi masyarakat untuk membangun kehidupan yang harmonis.

[Indonesia is a multi ethnic country, race, religion, tribe, etc. This diversity can trigger disharmony in the life of nation and state, and even terminate the history of a nation. It can be seen from the conflicts occur in the world. In

order to overcome the negative impact, it takes a study of locality tolerances which arise and live in society. The locality traditions become a treasure in establishing harmony in a multiethnic, religious, racial society. These charismatic constructions can be seen from the practical tolerance of Malay and Chinese ethnicity in Tanjungpinang; the harmony is built by cultural negotiations that have been applied directly or indirectly. The locality of cultural traditions should be maintained and developed continuously so that the country inhabited by this diversity can find a model of tolerance in accordance with its own locality, because in the locality possessed by, there is wisdom that can unite and useful for the community to build a harmony of life.]

Kata kunci: *Negosiasi Kultural, Toleransi, Etnik Melayu dan Cina*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang dihuni oleh multi-etnik yang tersebar di berbagai wilayah dan kawasan. Masing-masing etnik itu mempunyai karakter, identitas dan budaya tersendiri pula. Kehadiran keberagaman itu menjadikan bangsa ini mandiri yang bisa dibangun dengan kekuatan-kekuatan keberagaman tersebut. Tetapi kenyataan akhir-akhir ini, keberagaman itu terkoyak oleh berbagai kepentingan dan munculnya sikap-sikap intoleransi dalam realitas kehidupan berbangsa sehingga integritas bangsa yang harmonis terganggu. Ketergangguan keharmonisan ini, jelas merugikan kedaulatan dan kemajuan bangsa.

Goyahnya rasa keharmonisan itu semakin dirasakan di Indonesia. Dari berbagai catatan bisa dilihat bahwa beberapa kasus intoleransi dan konflik antar-etnis dan agama sempat mencuat. Pada awal tahun 2017 ini Antropolog Indonesia, telah mengeluarkan petisi bahwa bangsa yang dihuni oleh lebih dari 250 juta jiwa lebih ini tengah mengalami darurat toleransi itu. Petisi ini jelas menunjukkan sebuah prediksi kecemasan tentang kehancuran nasib bangsa Indonesia ke depannya. Jika hal ini dibiarkan, tentu tidak menutup kemungkinan bangsa yang dibangun oleh semangat juang yang tinggi ini akan mengalami *the end of history*.

Kekhawatiran itu dapat dipahami dengan berbagai data-data kasus yang menggelinding ke ranah sosial kehidupan masyarakat bangsa ini, seperti data kasus intoleransi yang tidak kunjung berhenti sampai awal tahun 2017 ini. Misalnya Puslit Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pernah merekap tentang kasus-kasus intoleransi di Indonesia berdasarkan laporan beberapa lembaga seperti dari SETARA institut, The Wahid Institute dan CRCS-UGM tentang intoleransi agama dari tahun 2007-2013 dengan angka kasus sebagai berikut¹:

Tabel: 1
Data Intoleransi Bergama di Indonesia dari 2007-2013

Lembaga	Jenis	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SERARA Institute	Tindakan	185	367	291	286	299	371	292
	Pesitiwa	135	265	200	216	244	264	222
The Wahid Institute	Kasus/peristiwa	-	227	228	196	277	274	245
CRCS - UGM	Kasus rumah ibadah	-	8	18	39	36	0	-

Sumber: Laporan Puslit Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama RI. 2013

Pada tahun selanjutnya 2014-2016 data-data kasus intoleransi itu tidak berhenti pula terjadi. Pada tahun 2014 misalnya, The Wahid Institute setidaknya mencatat telah terjadi intoleransi beragama itu sejumlah 245 kasus.² Kemudian pada tahun 2014-2015 sebagaimana dilaporkan oleh Setara Institute Selama tahun 2014 terjadi 134 peristiwa dan 177 tindakan intoleran sedangkan pada tahun 2015 terdapat 197 peristiwa dengan 236 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama

¹ Puslit Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama RI. 2013.

² <https://m.tempo.co/read/news/2014/04/15/078570722/245-kasus-intoleransi-di-indonesia-dalam-setahun> akses 19/1/2017.

dan berkeyakinan di Indonesia.³

Di berbagai belahan dunia pun kasus-kasus yang demikian juga tengah terjadi. Pertikaian terjadi dari Barat sampai Timur, dari Utara hingga Selatan. Dunia menyaksikan darah mengalir dari Yugoslavia, Cekoslakia, Zaire hingga Rwanda, dari bekas Uni Soviet sampai Sudan, dari Srilangka, India hingga Indonesia. Di Timur Tengah sedang berkecamuk perang saudara, peran antarsuku dan peran antaraliran keagamaan. Kemudian di Asia Tenggara juga tengah terjadi konflik antara Muslim Rohingya dengan umat Budha Myanmar. Tidak kalah penting lagi adalah, kemunculan ISIS yang sangat brutal.

Walaupun demikian, bangsa yang multietnik ini masih mempunyai konstruksi-konstruksi toleransi yang perlu dirawat dan dipelajari sebagai aset yang berpotensi untuk membangun keharmonisan, baik antaretnik maupun antaragama. Di antaranya dapat dilihat dari praktik toleransi yang dihasilkan oleh masyarakat multietnik dan agama itu di Kota Tanjung Pinang, terutama toleransi etnik Melayu dan Cina di sepanjang pantai pesisirnya. Kedua etnik itu bermasyarakat dengan harmonis dan damai. Keharmonisan tersebut bukan datang secara tiba-tiba, tetapi ada upaya perawatan kultural yang lama dalam jalinan kehidupan di antara mereka sehingga keberagaman-keberagaman bukan menjadi ancaman, tetapi keberagaman itu menjadi berguna bagi mereka, sebagaimana disebut oleh Gandhi keberagaman itu bermanfaat dan berguna selama di dalamnya ada toleransi.⁴

Menarik untuk dilakukan studi toleransi yang terkontruksi dalam keberagaman etnik yang ada di Kotatanjung Pinang tersebut, apalagi dalam konteks negara sedang mengalami kebangkrutan toleransi sekarang ini, tentu sangat membutuhkan kajian-kajian terkait dengan toleransi dan

³ <http://www.rmol.co/read/2016/01/18/232442/Kasus-Intoleransi-Pada-Tabun-2015-Meningkat>.

⁴ Mohandas Karamchand Gandhi, *Semua Manusia Bersaudara: Kehidupan dan Gagasan Mahatma Gandhi Sebagaimana Diceritakannya Sendiri*, terj. Kustiniyati Mochtar. Cet. II (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), h. 103.

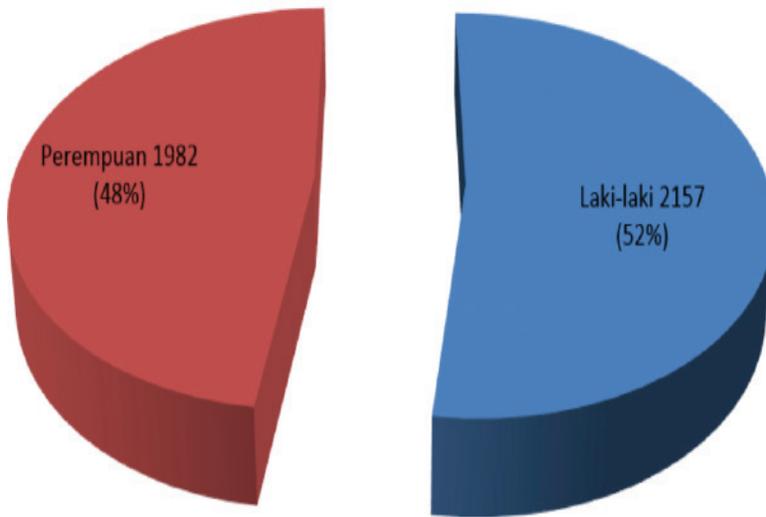
hidup harmonis dalam keberagaman. Studi ini merupakan penelitian lapangan dengan metode survei dan wawancara, dibantu dengan dokumentasi-dokumentasi untuk menjawab terbentuknya toleransi. Penelitian ini dilaksanakan di dua kelurahan di Kota Tanjungpinang, yakni kelurahan Kampung Bugis dan Kelurahan Senggarang.

Deskripsi Geografis

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu wilayah administratif dan sekaligus sebagai ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau. Ada empat kecamatan dan 18 kelurahan di wilayah kota Tanjungpinang ini. Salah satu dari empat kecamatan itu adalah kecamatan Tanjungpinang Kota dengan empat kelurahan. Dua di antara dari kelurahan ini, yaitu Kelurahan Kampung Bugis dan Kelurahan Senggarang merupakan wilayah dari penelitian, kedua-duanya terletak di bibir pantai dan bertetangga, serta masing-masing dihuni oleh penduduk multietnik, agama dan ras.

Berdasarkan data tahun 2014 kawasan Senggarang dengan luas 23 km² dihuni oleh penduduk dengan jumlah 4139 Jiwa dengan 1299 KK. Penduduk laki-laki lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan jumlah perempuan, laki-laki berjumlah 2157 (52%) orang sedangkan perempuan 1982 (48%) orang. Untuk melihat perbandingan jumlah penduduk ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1
Jumlah Penduduk Kelurahan Senggarang



Sumber: Diolah Dari Data Kelurahan Senggarang

Dilihat dari segi fasilitas dan simbol-simbol yang muncul di kelurahan ini dapat disimpulkan bahwa di kelurahan Senggarang dihuni oleh penduduk mayoritas beretnik Cina. Simbol-simbol itu dapat dilihat dari lampion-lampion, hiasan-hiasan Cina yang dipakai di masing-masing rumah, bentuk bangunan rumah Cina dan sebagainya. Di samping itu juga dapat dilihat dari peringatan-peringatan atau seremonial keagamaan atau budaya yang dilakukan, seperti memperingati Imlek yang sangat meriah dibandingkan dengan di kelurahan Kampung Bugis.

Keberadaan etnik Cina di Kelurahan Senggarang sudah terjadi semenjak penjajahan Belanda. Etnik Cina sengaja didatangkan oleh kolonial dengan tujuan sebagai pekerja di tambang-tambang. Kemudian mendirikan rumah ibadah Tionghoa di kawasan ini, menjadi rumah ibadah Tionghoa yang tertua di Tanjungpinang. Sekarang tempat itu

menjadi salah satu objek wisata andalan bagi masyarakat setempat yang dikunjungi oleh turis domestik dan mancanegara.

Penduduk etnik Cina di Kelurahan Senggarang ini banyak membangun pemukiman di bibir pantai sampai agak ke tengah laut. Rumah di sekitar laut dan pantai ini tertata dengan rapi dan bersih, di antara perumahan yang satu dengan yang lainnya dihubungi oleh jembatan yang disebut oleh masyarakat setempat dengan *pelataran*. Konstruksi rumah dibangun memakai kaki-kaki yang mencekam ke dasar laut. Jika air laut surut kaki-kaki rumah itu tampak jelas. Menurut informasi status tanah tempat bangunan berdiri itu merupakan hak guna bukan hak milik.

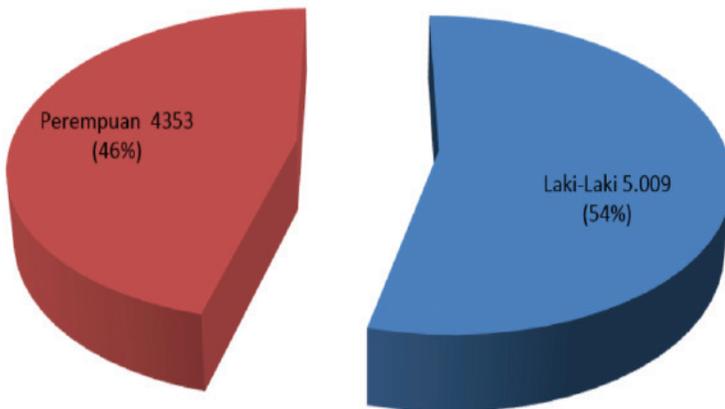
Di bawah rumah-rumah tersebut, terlihat pula ada perahu yang ditambatkan lengkap dengan alat-alat penangkap ikan. Hal ini menandakan, bahwa pemilik rumah itu mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Di sekitar perumahan itu pula tidak sulit untuk menemukan kafe-kafe sebagai tempat santai, mulai dari kelas teri sampai menengah ke atas.

Hal yang menarik lagi ditemukan pada rumah-rumah penduduk etnik Cina ini adalah adanya tulisan-tulisan Cina di setiap pintu masuk. Hampir semua rumah Cina ada tulisan itu, di samping simbol-simbol Cina lainnya. Konon tulisan itu seperti diceritakan masyarakat setempat sebagai salah satu doa untuk mendapatkan keberkahan, terhindar dari malapetaka dan hal-hal yang buruk lainnya. Tulisan itu dibagi-bagikan oleh pemuka agama kepada semua pendudukan beretnik Cina, kemudian disarankan untuk memasangnya di pintu utama hendak masuk ke dalam rumah.

Sedangkan Kelurahan Kampung Bugis dihuni oleh penduduk mayoritas beretnik Melayu. Hal ini pun bisa dilihat dari simbol-simbol, tradisi dan budaya yang ada di kelurahan ini. Misalnya, masyarakat melakukan aktualisasi adat-istiadat, ukiran dan simbol-simbol rumah Melayu. Kelurahan Kampung Bugis memiliki luas wilayah 25.000 Ha dihuni oleh penduduk sebanyak 9.362 jiwa dengan KK 2.547. Dalam hal ini, jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan, laki-laki berjumlah 5.009 (54%) orang dan perempuan 4.353 (46%)

orang.⁵ Dari segi luas dan jumlah penduduk maka luas wilayah dan jumlah penduduk Kelurahan Kampung Bugis lebih luas dan lebih banyak dibandingkan dengan Senggarang. Rincian jumlah penduduk di kelurahan Kampung Bugis ini dapat dilihat dengan jelas pada gambar di bawah ini:

Gambar 2
Jumlah Penduduk Kelurahan Kampung Bugis



Sumber: Diolah Dari Data Kelurahan Kampung Bugis

Di antara masyarakat Kelurahan Kampung Bugis juga mendirikan rumah sebagai tempat tinggal di bibir laut dengan konstruksi yang sama dengan di Senggarang. Namun jumlahnya tidak sebanyak rumah-rumah yang ada di sekitar bibir pantai dan laut di Senggarang. Hal ini dipengaruhi oleh struktur kawasan di Kampung Bugis yang datar dan tidak mempunyai perbukitan seperti di Senggarang serta kawasan daratnya lebih luas sehingga lebih banyak mendirikan bangunan rumah di dataran dibandingkan dengan di laut.

Tarnsportasi unggulang untuk menghubungkan masyarakat ke kota Tanjungpinang lebih dominan dilakukan dengan transportasi laut dibandingkan dengan transportasi darat karena transportasi darat jaraknya

⁵ Data Kelurahan Senggarang dan Kelurahan Kampung Bugis pada tahun 2015.

tempuh ke kota Tanjungpinang lebih jauh dibandingkan dengan jarak tempuh laut. Fasilitas transportasi laut ini dilengkapi dengan dermaga-dermaga kecil yang dibangun oleh pemerintah sebagai tempat menaikan dan menurunkan penumpang dari perahu-perahu kecil. Perahu-perahu itu merupakan milik masyarakat setempat, biasanya pagi digunakan untuk menangkap ikan dan siang digunakan untuk menarik penumpang. Perahu kecil ini dipanggil oleh masyarakat setempat dengan *pompong*. Di atasnya tidak ada fasilitas pengaman, setiap penumpang hanya duduk di beberapa deretan bangku kayu yang ditempelkan ke badan perahu. Perahu tersebut memakai mesin tempel dan dikendalikan oleh dua orang, masing-masing mempunyai pembagian kerja, satu orang untuk kendali mesin dan satu orang lagi mengendalikan untuk merapat ketika sampai di dermaga atau pelataran.

Definisi Etnik

Masyarakat setempat mengklasifikasikan dua kelompok penduduk ke dalam dua etnik saja: Melayu dan Cina. Biasanya kelompok etnik selain dari Cina, masyarakat setempat menyebutnya dengan kelompok etnik Melayu, seperti Minang, Jawa, Sunda, Ambon, Aceh, Bugis dan sebagainya. Pengertian yang dikonstruksi oleh masyarakat setempat, sama dengan definisi *ethnic group* atau kelompok etnik atau suku bangsa yang didefinisikan oleh antropolog, yakni satu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan.⁶

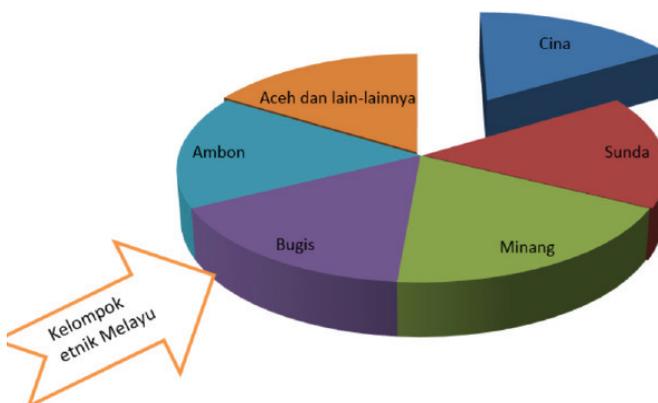
Sementara jika dilihat dari identitas keetnikan berdasarkan postur tubuh dan raut muka, sudah sangat sulit membedakan antara Cina dan Melayu karena sudah terjadi perkawinan silang antara kedua etnik tersebut. Akibat dari perkawinan ini di antara mereka pun sulit menentukan dirinya apakah menjadi seorang Melayu atau Cina. Namun, hal itu tidak menjadi permasalahan bagi penduduk di sini karena tidak ada ukuran yang konkret dikonstruksi oleh masyarakat jika terjadi perkawinan silang

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 214-215.

itu apakah generasi mereka mengklaim dirinya Cina atau Melayu karena tidak ada aturan yang tegas seperti yang dilakukan oleh etnik Dayak kalau pindah agama ke Islam berarti identitas Dayak-nya harus ditinggalkan dan klaim dirinya sudah beralih kepada Melayu. Begitu ketegasan yang dikonstruksi oleh etnik tersebut. Agama menjadi salah satu indikator untuk mengeluarkan seseorang dari etniknya. Sama pula halnya dengan etnik Minangkabau, jika ada masyarakatnya yang pindah agama dari Islam ke agama lain apakah disebabkan oleh perkawinan, ekonomi, politik dan seterusnya maka orang yang beretnik Minangkabau yang pindah agama itu dibuang sepanjang adat, tidak lagi mendapat pengakuan sebagai orang Minangkabau. Dengan kata lain, dia putus hubungan kesukuan dan tidak mendapatkan hak-hak yang ada di dalam sukunya.

Dari definisi etnik yang dikemukakan oleh masyarakat baik di Kelurahan Kampung Bugis maupun Senggarang maka dapat dijelaskan bahwa masyarakat setempat mengklasifikasi dua etnik di mana salah satu etniknya terdiri dari kumpulan-kumpulan etnik yang serumpun. Klasifikasi ini dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini:

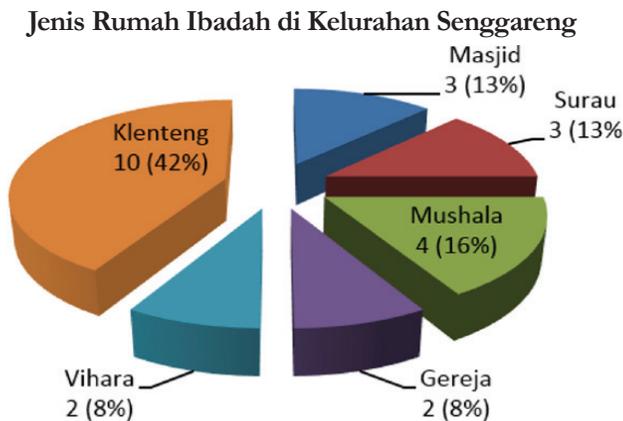
Gambar 3 Klasifikasi Etnik dalam Pemahaman Masyarakat Setempat



Berdasarkan pada peta pemaknaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, pada dasarnya masing-masing kelurahan hampir terdapat kelompok-kelompok etnik tersebut. Namun, karena masyarakat telah membuat klasifikasi seperti itu maka kelompok-kelompok etnik yang ada, tidak pula mempopulerkan identitas etnik aslinya, mereka selalu meleburkan menyebut dirinya sebagai orang Melayu. Tidak mendefinisikan dirinya dengan tegas sebagai orang Jawa, Sunda, Madura atau yang lainnya tetapi memperkuat dirinya dalam pendefinisian yang ada. Di samping ditemukannya pendefinisian etnik-etnik tersebut, pada masing-masing kelurahan ternyata tidak hanya memeluk agama yang sama, tetapi juga ditemukan lebih dari satu agama. Hal ini terbukti dengan adanya jenis rumah ibadah yang lebih dari satu, seperti masjid, vihara, kelenteng dan sebagainya.

Di Kelurahan Senggarang yang mayoritas etnik Cina maka rumah ibadah paling dominan ditemukan adalah rumah ibadah kelompok etnik ini. Dari 25 rumah ibadah yang ada, 10 (42%) di antaranya adalah kelenteng sebagai tempat ibadah orang Cina, kemudian disusul masing-masing 2 (8%) vihara dan gereja, selebihnya merupakan rumah ibadah umat Islam.

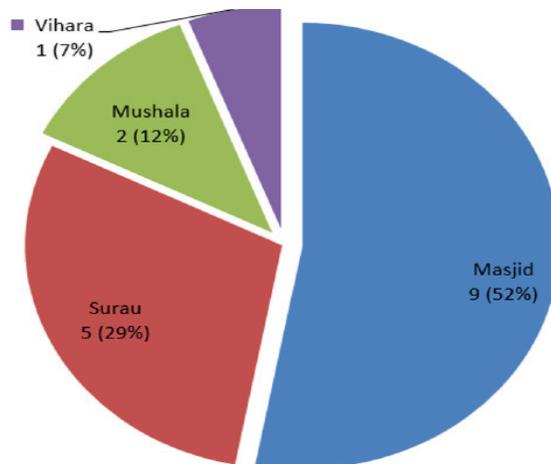
Gambar 4



Sumber: Monografi Kelurahan Senggarang Tahun 2015

Sedangkan di kelurahan Kampung Bugis pada umumnya masyarakat mayoritas beragama Islam, hal ini terlihat dari dominasi jumlah rumah ibadah umat Islam tersebut di kawasan ini. Ada 17 rumah ibadah, 9 (52%) adalah masjid, 5 (29%) surau, 2 (12%) dan 1 (7%) vihara sedangkan kelenteng tidak ditemukan karena jarak antara kelenteng tertua di Kelurahan Senggaren masih dekat dari Kelurahan Kampung Bugis. Rincian rumah ibadah yang ada di Kelurahan Kampung Bugis ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 5
Jenis Rumah Ibadah Di Kelurahan Kampung Bugis



Sumber: Monografi Kelurahan Kampung Bugis Tahun 2015

Dilihat dari beberapa perspektif di atas dapat disimpulkan bahwa keberagaman etnik dan keberagaman agama, menjadi salah satu indikator masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam pluralitas dan juga oleh berbagai kompleksitas. Durkheim menyebut masyarakat yang kompleks itu sudah tumbuh dan berkembang dengan berbagai struktur dan sistem sosial, minimal dapat dilihat dari wujud solidaritas yang terkonstruksi di tengah-tengah masyarakat itu. Bagi Durkheim konstruksi

solidaritas itu ada dua: solidaritas mekanik dan organik, keduanya dapat dilihat dari kemampuan serta kerasionalan masyarakat tersebut tumbuh dan berkembang. Konstruksi solidaritas mekanik, adalah solidaritas masyarakat homogen yang ditandai dengan kekuatan-kekuatan hubungan emosional. Sedangkan masyarakat yang terkonstruksi di dalam solidaritas organik adalah masyarakat yang heterogen dan kekuatan rasionalitas dan logisitas menjadi andalannya.⁷

Namun dalam keberagaman itu masih terkonstruksi berbagai kepentingan untuk mengkesistensikan keberadaan identitas dan keharmonisan atau sebaliknya. Meski begitu, dari realitas yang ada dalam masyarakat kedua kelurahan tersebut saling membangun keharmonisan dengan memelihara sikap-sikap yang dibutuhkan, salah satunya merawat toleransi.

Toleransi

Keberagaman dapat menjadi bernilai positif, apabila di dalamnya dibangun sikap tanpa kebencian antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu keberagaman tersebut harus dipelihara menjadi satu jalinan hidup yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan superioritas atau skeptis yang mengecilkan makna-makna kehidupan sosial yang harmonis. Dalam perspektif Gandhi keberagaman dapat menjadi modal sosial yang positif apabila ada toleransi di dalam keberagaman.⁸ Negara-negara yang dibangun dengan beragam etnik, agama, ras dan sebagainya semestinya merawat dan mengkonstruksi toleransi dengan berbagai pendekatan, seperti dialog antaragama atau antarkeyakinan bahkan melalui pendidikan.

Pendekatan melalui dialog misalnya, dilakukan baik dalam level yang terkecil sampai pada level luas, di antaranya melalui pertemuan rutin sedunia dalam wadah *interfaith dialogue* yang dihadiri oleh semua perwakilan umat beragama. Pada tahun 2010 Indonesia pernah menjadi

⁷ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 188-189.

⁸ Mohandas Karamchand Gandhi, *Semua Manusia Bersaudara...*, h. 103.

tuan rumah *interfaith dialogue* itu.

Pendekatan pendidikan bisa dilakukan dengan penyelenggaraan pendidikan multikultural. Di Indonesia pelaksanaan pendidikan multikultural merupakan amanat pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2003 yang menyatakan “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.”

Pada sisi lain, masyarakat juga telah mengkonstruksi dan merawat toleransi itu dengan tindakan dan budaya keharmonisan yang mempotensikan basis-basis kultural yang ada dalam kehidupannya. Basis-basis toleransi itu dalam kehidupan sosial, bisa dibangun dengan tindakan sosial masyarakat. Weber menyebut empat tindakan sosial yang harus dilakukan manusia: tindakan sosial rasional instrumental, rasional nilai, afektif dan tradisional.⁹

Tindakan sosial rasional instrumental adalah tindakan yang dilakukan atas dasar kelogisan instrumen yang dipakai untuk mewujudkan toleransi tersebut. Rasional nilai, adalah nilai-nilai normatif yang menjadikan suatu tindakan berdaya guna sesuai dengan nilai-nilai tersebut, sedangkan tindakan afektif dipelihara melalui perasaan-perasaan yang dapat menjadikan masyarakat toleran. Sedangkan tindakan sosial tradisional merupakan tindakan yang sudah dilakukan secara turun-temurun, dipelihara dengan baik.

Selain pendekatan tindakan sosial Weber, konstruksi toleransi bisa dilihat dari teori struktural fungsional, yang memosisikan masyarakat selalu berada dalam keseimbangan *equilibrium*. Untuk mewujudkan keseimbangan itu, dibutuhkan penjagaan nilai-nilai, norma dan struktur-struktur yang sudah berfungsi selama ini untuk membangun keharmonisan tersebut. Analogi Parsons dalam konteks ini dapat digunakan untuk menjelaskan eksistensi kebutuhan masyarakat dalam merawat dan

⁹ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi...*, h. 214.

mewujudkan toleransi itu dengan empat persyaratan fungsional dari sebuah sistem.¹⁰ Empat persyaratan itu, saling terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan, empat hal ini disingkat oleh Parsons dengan AGIL.¹¹

Pertama A (adaptation) adanya penjagaan kesesuaian dalam sebuah sistem sehingga satu sistem bisa betahan atau mampu berfungsi seperti yang diharapkan. Dalam masyarakat yang beragama sudah saatnya suatu persyaratan logis harus dilakukan sehingga keberagaman itu tidak tumbuh menjadi ancaman yang merugikan.

Kedua G (Goal attainment) merupakan tujuan strategis yang dirumuskan sehingga dengan tujuan-tujuan itu ada konstruksi-konstruksi strategis yang dilakukan, yang bersinergi dengan persyaratan-persyaratan lain. Dalam konteks ini, masyarakat mempunyai tujuan hidup harmonis dengan keberagaman-keberagaman yang dialaminya dalam proses kehidupan sosial. Untuk itu harus menciptakan keharmonisan yang mampu beradaptasi, misalnya mentradisikan bahasa damai, solidaritas dan seterusnya.

Ketiga I (Integration) merupakan penjagaan tatanan-tatanan atau bangunan toleransi yang sudah terbentuk. Menjaga bahasa damai, menjaga solidaritas sosial, menjaga kerjasama lintas etnis dan seterusnya. Penjagaan ini sebagai suatu komponen yang harus dipertahankan untuk keberlangsungan suatu sistem yang dikonstruksi tersebut.

Keempat L (Latent pattern maintenance and tension management) pola-pola pemeliharaan yang dikembangkan untuk membangun keharmonisan dan toleransi, misalnya melalui pola bermain, pola pendidikan dan seterusnya.

Sehubungan dengan empat corak persyaratan Parsons dan tindakan-tindakan sosial yang dikembangkan oleh Weber di atas, ternyata masyarakat etnik Melayu dan Cina sudah membangun serta memelihara konstruksi toleransi itu dengan kultur-kultur yang representatif dalam

¹⁰ Mudji Sutrisno & Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kansius, 2005), h. 59-61.

¹¹ Silfia Hanani, *Sosiologi Pendidikan Keindonesiaan* (Yogyakarta: Arruz Media, 2013), h. 57-59.

kehidupan sosial. Hal ini sama dengan pendapat Dove yang mengatakan bahwa masyarakat lokal pada dasarnya mempunyai kearifan-kearifan tersendiri dalam mengatur tata kehidupan dan tata lakunya, kearifan itu yang membangun harmonisasi antarsesamanya.¹²

Begitu juga dengan masyarakat Cina dan Melayu di Kota Tanjungpinang. Dalam masyarakat tersebut ada kearifan lokalitas yang dijaga dalam membangun hubungan harmonis di antara mereka, di antara kearifan-kearifan yang mengkonstruksi keharmonisan itu adalah:

Konstruksi Toleransi di Kedai Kopi

Kedai kopi adalah tempat yang menjual kopi dan beberapa menu makanan ringan. Kedai kopi terutama bagi laki-laki adalah arena sosial yang tidak bisa dipisahkan dari kebiasaan sehari-harinya. Dalam masyarakat Melayu kedai kopi simbol kuliner yang telah terwujud dalam waktu cukup lama.

Layaknya sebagai sebuah kedai tempat minum kopi, di kedai itu disusun bangku-bangku atau kursi-kursi dan meja sehingga tempat itu dari tata ruangnya seperti sebuah ruang diskusi, ruang untuk bisa berbicara lepas tanpa sekat-sekat prasangka dan curiga. Semua informasi digelar kadang-kadang dengan berbagai topik dan tema, tetapi pada umumnya topiknya menyesuaikan dengan isu-isu yang sedang hangat dan berkembang. Jika informasi sudah tersebar di kedai kopi, satu kampung pun ikut mendapatkan informasi itu sehingga kedai kopi tidak salah disebut-sebut sebagai corong informasi masyarakat kampung.

Kedai kopi ini menjadi abadi sampai sekarang, orang-orang perkotaan bahkan semakin *trend* duduk di kedai kopi dan bahkan kedai kopi menjadi daya tarik tersendiri karena *style*-nya tidak mengenal kelas dan waktu duduk yang dibatasi. Sekali pun hanya belanja secangkir kopi boleh duduk sampai waktu tidak terbatas.

¹² Silfia Hanani, *Proceeding AICIS 2014* "Toleransi dalam Perbedaan Studi Kontruksi Toleransi Umat Beragama di Pengungsian Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara [http:// digilib.uin-suka.ac.id/17131/](http://digilib.uin-suka.ac.id/17131/).

Semakin terkenal sebuah kedai kopi maka semakin ramai pengunjungnya dan mempunyai langganan khusus pula. Biasanya kedai kopi ternama itu menjadi incaran bagi laki-laki untuk duduk menghabiskan waktu. Kadang-kadang kedai kopi juga dijadikan sebagai tempat untuk pertemuan dari perjanjian yang dilakukan oleh seseorang atau dengan kelompok orang.

Hal paling menarik dari kedai kopi adalah bisa menjadi wadah menyatukan masyarakat lintas etnik, lintas agama dan lintas keyakinan. Di kedai kopi mereka bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Kondisi kedai kopi seperti ini di Tanjungpinang menjamur, bahkan sebuah situs menulis Tanjungpinang dijuluki negeri 1000 kedai kopi dan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di kedai kopi.¹³

Dengan demikian, kedai kopi adalah simbol dari media negosiasi di antara pengunjungnya, negosiasi kultural dengan nilai-nilai lokal setempat sehingga kedai kopi tidak sekadar melepas dahaga dan candu kopi bagi masyarakat, tetapi juga arena bermain, berkawan dan berkomunikasi lintas etnik. Kedai kopi semacam medium kultural yang menyatukan masyarakat dengan bermacam latar belakang.

Tradisi kedai kopi ini hampir sama dengan tradisi *lapau* di Minangkabau. *Lapau* adalah arena laki-laki untuk membangun dunia sosialnya melalui minum kopi atau camilan. Biasanya dikunjungi oleh laki-laki di pagi hari. Laki-laki Minang bukan minum kopi pagi buatan istrinya, tetapi justru pergi ke *lapau* untuk menyeduh kopi bersama-sama. Kadang-kadang dari adukan sendok dalam gelas untuk gula dan kopi terdengar sebuah irama dengan simbol-simbol bunyi yang multimakna. Bunyi adukan itu bagi *kuala lapau* sudah tahu maksudnya. Bahkan dari bunyi adukan itu pun dapat ditangkap makna bahwa seseorang sedang jatuh cinta. Waktu yang dihabiskan seseorang di *lapau* sangat tergantung kepada isu yang didiskusikan, semakin menarik isu maka semakin lama

¹³ <http://yopiefranz.com/2016/10/tanjungpinang-negeri-seribu-kedai-kopi/diakses-23/1/2017>.

laki-laki menghabiskan waktunya di tempat itu. Menariknya, kedai kopi di Tanjungpinang sebagai tempat refleksi pertemanan antaretnik karena di tempat itu laki-laki berinteraksi secara luas dan tidak ada sekat sosial; tidak ada pembatasan kedai kopi untuk Cina atau Melayu. Singkat kata, kedai kopi sebagai tempat perkawanan lintas etnis, agama, suku dan ras.

Lebih jauh, kedai kopi adalah medium komunikasi global yang membangun berbagai ide gagasan dan mendiskusikan isu-isu lintas sekat. Bahkan dengan keterbukaan komunikasi di kedai kopi itu, sering dijadikan pula sebagai tempat kampanye bagi politikus menjelang datangnya pesta demokrasi. Biasanya para politikus mempunyai basis kedai kopi yang dipilih tersendiri. Kedai kopi bisa menjadi perebutan bagi para politikus untuk mendapatkan dukungan dan simpatisan. Namun, basis-basis politik tersebut tidak memperkecil sekat-sekat perkawanan dan perteman di antara penikmat kopi.

Akhir-akhir ini kedai kopi sepertinya menjadi komunitas, di mana jalinan persaudaraan di antara mereka sudah terkonstruksi dengan solidaritas mekanik. Ikatan sosial yang kuat dan mendesain rasa-rasa kemanusiaan yang lebih tinggi. Di antara mereka tidak mudah lagi diprovokasi karena pertimbangan-pertimbangan ikatan sosial yang kuat dibangun dalam arena medium komunikasi kedai kopi yang tidak terikat oleh kepentingan-kepentingan. Dari kedai kopi pun bisa melakukan pengumpulan dana untuk sesama yang memerlukan tanpa harus disibukkan oleh etnisitas mereka. Gerakan sosial pun muncul dari kedai kopi, gerakan itu juga semakin mengikat hubungan emosional di antara penikmat kedai kopi tersebut. Munculnya harmonisasi kedai kopi ini sebagai kesadaran kultural yang bergerak dari arus akar rumput bukan atas kehendak kepentingan-kepentingan dari masing-masing keberagaman, namun dioperasionalkan melalui tradisi lokalitas setempat.

Bagi kolonial Belanda, orang-orang Melayu yang ditemui duduk di kedai kopi ini disebut sebagai salah satu citra Melayu pemalas karena mereka hanya melihat dari sisi duduk menghabiskan waktu di kedai kopi,

tidak melihat sisi lain yang dibangun di balik itu. Padahal dahulu, laki-laki yang duduk di kedai kopi juga sedang menyusun strategi untuk melakukan perlawanan terhadap mereka.

Kedai kopi menjadi aset kultural yang sudah mengaktualisasikan gerakan-gerakan sosial, misalnya dari kedai kopi lahir pula komunitas-komunitas pencinta kopi, komunitas pencinta kuliner, pencinta budaya Melayu dan seterusnya. Komunitas-komunitas ini tidak hanya terkooptasi oleh etnik tetapi dibangun lintas etnik yang bisa mendialogkan situasi dan kondisi ke dalam bahasa-bahasa sosial.

Selagi aset-aset lintas etnik itu masih ada dalam mengakomodasi masyarakat yang hidup dalam keberagaman, setidaknya masyarakat masih merawat keharmonisan dan toleransi dalam keberagaman. Kedai kopi pada prinsipnya menjadi media untuk mengakomodasi lintas etnik dan lintas agama sehingga terjalin hubungan yang harmonis.

Dalam perspektif Habermas, mengapa kedai kopi bisa menjadi media negosiasi dalam membina perkawanan atau solidaritas di antara etnik-etnik itu karena selain dibangun dengan kultur interaktif, juga dipengaruhi oleh dua tipe konstruksi komunikasi di kedai kopi: tindakan strategis dan tindakan komunikatif.¹⁴ Tindakan strategis merupakan komunikasi yang terlebih dahulu ditentukan oleh tujuan untuk melakukan komunikasi tersebut, tujuan ini sering tersembunyi. Sedangkan tindakan komunikatif adalah tindakan yang mengkonstruksi kesadaran yang melahirkan kesepahaman.

Kesepahaman ini, menjadi agen dalam membangun keharmonisan lintas etnik, lintas identitas dan sebagainya. Kesadaran kultural lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan kesadaran logis dan pragmatis. Kesadaran kultural lahir dari interpretatif dan pendekatan-pendekatan keseharian sedangkan kesadaran logis dan pragmatis adalah kesadaran yang dibangun oleh tujuan-tujuan pragmatis. Tujuan pragmatis ini, bisa berlangsung sementara sedang kultural berlangsung dengan cukup lama

¹⁴ Ritzer & Smart, *Teori Sosial* (Jakarta: Nusa Media, 2012), h. 400-401.

dan bahkan membatin. Kesadaran-kesadaran yang terkonstruksi di kedai kopi itu telah memberikan konsep perkawanan yang berimplikasi pada keseimbangan antaretnik, bukan hanya sekadar pertemanan pragmatis, tetapi jauh daripada itu bermacam etnik pada akhirnya berkompetisi tidak dengan kecurigaan.

Konstruksi Elite Lintas Etnik

Keharmonisan antaretnik, agama, suku dan ras juga tidak dapat dilepaskan daripada peran elite-elite dari masing-masing etnik tersebut. Walaupun masyarakat tidak mengalami konflik tersebut. Komunikasi elite-elite ini selalu dilakukan oleh masyarakat etnik Melayu dan Cina. Komunikasi antarelite itu lebih dominan diakomodasi oleh Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Kecamatan Tanjungpinang sehingga dengan komunikasi itu elite-elite bisa melakukan konstruksi budaya damai dan toleran dengan *liyan*.

Baik etnik Melayu maupun Cina masih mempercayai elite sebagai kekuatan dalam mengakomodasi masyarakat atas berbagai kepentingan, termasuk kepentingan keharmonisan. Kepatuhan terhadap elite masih tercermin dalam kehidupan masing-masing etnik itu. Hal ini bisa dilihat dari berbagai aspek, misalnya kepatuhan terhadap elite agama dan adat dalam pengaturan kehidupan sosial masyarakat.

Oleh sebab itu, jika terjadi berbagai masalah baik agama, sosial dan seterusnya elite-elite tersebut menjadi komponen terpenting dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Elite masih mempunyai peran yang signifikan dalam membentuk keteraturan sosial masyarakat. Kesadaran kepentingan terhadap eksistensi elite ini dapat dilihat dari kehadiran elite dalam membangun keteraturan sosial. Elite-elite mempunyai ruang dialog harmonis yang tidak terpisahkan dengan umatnya. Di antara elite-elite juga mempunyai kesepakatan-kesepakatan yang membangun keharmonisan itu. Masalahnya kesepakatan elite-elite ini menjadi salah faktor penting dalam membangun toleransi. Realitas ini bisa dilihat buktinya dalam masyarakat Padang Panjang Sumatera Barat.

Seperti yang dikemukakan oleh Hanani, salah satu kunci keharmonisan di antara masyarakat beragama mayoritas dengan minoritas adalah adanya kesepakatan elite-elite agama untuk membangun keharmonisan. Di antara kesepakatan itu, baik tertulis maupun tidak tertulis adalah membangun dakwah-dakwah atau dialog-dialog agama dengan bahasa yang santun dan tidak mengurai kebencian.¹⁵

Peran dari elite ini sangat ditentukan oleh otoritas atau legitimasi yang membentuknya. Dalam pandangan Weber¹⁶ ada tiga otoritas elite tersebut, dimana otoritasnya itu sangat menentukan kekuatan peran dari elite. Tiga otoritas elite itu adalah, tradisional, karismatik dan rasional legal. Otoritas tradisional merupakan legitimasi elite yang diperoleh berdasarkan tradisi-tradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat, berdasarkan kepercayaan yang dianggap selama ini mempunyai kekuatan-kekuatan yang bisa mewakili secara supranatural atau mempunyai kecakapan tersendiri. Elite seperti ini, biasanya lebih dominan menjadi kata kunci dalam urusan-urusan kesejatan sebuah masyarakat. Legitimasinya bisa berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat tidak hanya dalam kekuatan kemampuan yang profan, tetapi juga menjadi kekuatan dalam keagamaan. Otoritas tradisional seperti ini, dalam kedua etnik ini masih bisa dilihat dan berlaku.

Otoritas karismatik elite yang dilegitimasi berdasarkan personal kharisma yang dimiliki oleh seseorang. Elite berdasarkan karismatik ini, jumlahnya jelas tidak banyak, mereka menjadi pilihan atas personal yang melekat padanya. Otoritas legal rasional, elite yang ditunjuk atau mendapatkan legitimasi berdasarkan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, mungkin bisa dilihat dari eksistensi lurah, atau elite-elite yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dari peraturan-peraturan yang mendasari dibentuknya eksistensi seseorang menjadi bagian tidak terpisahkan untuk

¹⁵ Silfia Hanani, *Renai, Model Kontruksi Antar Umat Pemeluk Agama Mayoritas dan Minoritas pada Masyarakat Perkotaan Kota Padang Panjang Sumatera Barat* (Salatiga: Percik, 2011), h. 162.

¹⁶ Rintzer & Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 37-39.

menjalankan peran dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya ketiga legitimasi elite itu ada dalam masyarakat setempat, elite tradisional misalnya terlihat dari membangun semangat keberagaman dan bertanggung jawab dalam pelestarian-pelestarian nilai-nilai luhur. Baik etnik Melayu maupun Cina, kedua kelompok ini mempunyai pelestarian nilai-nilai luhur, nilai-nilai luhur dalam membangun relasi dan hubungan yang saling menguntungkan. Dengan kata lain, mereka mendamaikan hidup dalam keberagaman dengan komunikasi-komunikasi yang harmonis.

Perkawinan Antaretnik

Perkawinan antaretnik Melayu dengan Cina sudah menjadi bagian dari salah satu sisi kehidupan sosial masyarakat setempat. Perkawinan antaretnik ini telah menghasilkan berbagai metafora baru dalam masyarakat kedua etnik. Di antaranya dilihat dari postur tubuh dan raut wajah. Cukup sukar membedakan antara kedua etnik ini. Orang-orang Melayu sudah mempunyai mata yang sipit dan postur tubuh yang mungil. Dari hasil perkawinan antaretnik tersebut susah mendefinisikan seseorang dengan identitas keetnikannya. Tak ayal, seseorang berwajah agak ke-Cina-an tetapi dia menyebut dirinya sebagai Melayu atau sebaliknya. Tidak ada klaim khusus untuk seseorang yang terlahir dari proses perkawinan antaretnik ini. Kadang-kadang ia bisa mengakui dirinya sebagai etnik Cina dan kadang-kadang bisa pula mendefinisikan dirinya sebagai orang Melayu.

Dalam perkawinan antaretnik, ada perjanjian *hidden* yang berkaitan dengan agama, ada negosiasi terselubung yang dikonstruksi. Tetapi hal tersebut tidak menjadi bara konflik di antara etnik-etnik tersebut. Negosiasi itu terkait dengan masalah status keagamaan. Jika yang melangsungkan perkawinan itu berbeda agama maka secara tersembunyi ada kontrak yang sudah dimengerti dan dipahami. Salah satu dari yang berbeda agama itu harus melakukan konversi agama. Terutama sekali jika salah satu beragama Islam maka pasangannya yang beragama lainnya

harus konversi agama ke Islam. Negosiasi ini, walaupun tidak tertulis, namun sudah berlangsung secara terus-menerus dan diamalkan dengan baik. Hal ini terjadi sebagai salah satu komitmen dalam adat Melayu dalam menjaga *marwah* Melayu di mana agama menjadi salah satu supremasi yang tidak bisa dialihkan. Sepertinya ada pembentukan negosiasi, di mana pada kelompok lain terjadi penguatan identitas dan kelompok yang lainnya lagi terjadi negosiasi dengan identitas yang baru tetapi tidak merusak harmonisasi. Dalam konteks ini, negosiasi telah melahirkan suatu identitas yang baru.¹⁷

Namun, ketika seseorang memutuskan untuk konversi agama maka status identitas etniknya menjadi terbelah dua; di satu sisi bisa menyebut diri menjadi Melayu dan juga bisa tergolong pada etnik Cina. Berbeda dengan yang dialami oleh orang Dayak, jika melakukan konversi agama ke dalam Islam maka status etnik ke-Dayak-annya dihapus dan resmi menjadi etnik Melayu, tidak lagi sebagai orang Dayak.¹⁸

Komitmen atau perjanjian *hidden* ini, ternyata tidak menjadi pemicu konflik di antara mereka tetapi menjadi penjalin *silaturahmi* di antara etnik-etnik yang berbeda itu. Tidak membuat putus hubungan antarkeluarga, tetapi menerima kehadiran keluarga baru yang terjalin melalui pernikahan. Dengan demikian terbentuk redefinisi keluarga luas di antara mereka, di mana keluarga yang dimaksudkan tidak hanya keluarga-keluarga yang seagama dan se-etnik saja, tetapi sudah ada keluarga di luar etnik dan yang beda agama.

Kesadaran itu ternyata berpengaruh pula terhadap sikap dan solidaritas dalam keberagaman. Solidaritas mekanik terkonstruksi dalam kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat dari tolong-menolong yang dilakukan secara bersama. Ketika terjadi kematian secara bersama-sama mendatangi rumah duka. Tidak ada sekat etnik lagi. Begitu pula dalam

¹⁷ Stella Ting-Toomey, *Communicating Across Culture* (New York: The Guildford Press, 1999), h. 40.

¹⁸ Yekti Maunati, *Identitas Dayak Komodifikasi dan politik Kebudayaan* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 84-85.

hal-hal pembangunan kampung. Di antara mereka membangun secara bersama. Bahkan orang Cina pun ikut berkontribusi dalam membangun masjid, sekali pun agama mereka bukan Islam.

Hubungan keharmonisan itu diperkuat lagi oleh pola pemukiman di antara etnik-etnik itu. Di antara mereka tidak tersegregasi satu sama lain. Mereka bisa tinggal berdampingan tanpa diganggu oleh perbedaan-perbedaan. Tidak heran jika dua kelompok etnik tersebut bisa hidup berdampingan dan bertetangga satu sama lainnya. Ketika waktu senggang, mereka bisa bercengkerama dengan bersama-sama dan saling bertukar pikiran layaknya hidup bertetangga secara harmonis.

Namun, agak berbeda sedikit di kawasan Kelurahan Senggarang di mana pemukiman-pemukiman bagi kelompok etnik Cina agak tersegregasi. Mereka lebih dominan tinggal dan membangun rumah-rumah di bibir pantai. Rumah-rumah tersebut hampir tidak diselingi oleh masyarakat Melayu. Semuanya menjadi perkampungan Cina. Dominasi ke-Cina-an sangat kentara di sini. Namun dalam proses sosial mereka juga mempunyai interaksi dengan masyarakat beda etnik, melalui berbagai media seperti pasar, sekolah dan sebagainya.

Dalam proses kehidupan sosial, mereka tidak membangun superioritas budaya, identitas dan sebagainya. Masing-masing hidup dalam kesamarataan identitas, budaya dan simbol-simbol. Simbol-simbol itu muncul terutama pada hari-hari besar masing-masing. Seperti ketika hari besar Islam maka simbol-simbol ke-Melayu-an dan simbol Islam begitu mewarnai di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berbagai etnik itu. Begitu pula dengan ketika memperingati hari-hari besar Cina. Simbol-simbol ke Cina-an pun mewarnai.

Jadi masyarakat di kawasan ini sudah sangat terbiasa dengan melihat simbol-simbol lintas etnik tersebut. Tidak ada kecurigaan atas simbol itu, di antara mereka memahaminya sebagai produk budaya yang harus dimaknai dalam konteks keharmonisan sehingga tidak ada pelarangan-pelarangan dengan simbol-simbol masing-masing etnik.

Di samping itu, dengan adanya ikatan kekerabatan akibat perkawinan ini tidak hanya lahir sebagai kesadaran akan simbol-simbol, tetapi juga melahirkan situasi keharmonisan yang sangat fungsional dalam menjaga hubungan solidaritas yang dibutuhkan dalam keharmonisan. Di antara mereka membangun empati untuk sesama. Maka tidak heran jika orang-orang berbagi *ampau* untuk saudaranya lintas iman, lintas etnik dan seterusnya.

Begitu pula pada hari raya. Di antara mereka saling berkunjung dan ber-*silaturahmi*. Mereka merayakan hari raya umat Muslim. Saling mengucapkan selamat hari raya sambil berjabat tangan dengan erat. Apalagi yang memiliki hubungan kekeluargaan melalui perkawinan. Keluarga-keluarga lintas agama datang untuk ber-*silaturahmi* untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara mereka.

Hubungan perkawinan seperti ini sudah menjadi catatan sejarah dalam suku-bangsa di dunia ini. Di Indonesia misalnya, kedatangan para pendakwah agama, salah satu hal yang dilakukan adalah menegosiasikan dirinya dengan masyarakat lokal. Salah satu di antaranya dengan ikatan perkawinan. Perkawinan sebagai salah satu dinamika yang melahirkan struktur kekerabatan dengan alat penanda yang baru.

Pelataran dan Pasar Tradisional

Masyarakat masih memiliki ruangan publik yang berkontribusi untuk mempertemukan di antara mereka secara tidak formal. Muncul dengan kesahajaan dan atas kepentingan bersama. Di antara mereka melakukan interaksi dan komunikasi dengan dekat sehingga melahirkan perkawanan yang bisa membangun solidaritas antarsesama. Ketika solidaritas itu terjadi secara tidak langsung, persemaian kultur damai di tengah-tengah kehidupan masyarakat juga menjadi bagian yang terkonstruksi dalam keberagaman.

Oleh sebab itu, aset-aset kultur lokal tidak hanya sekadar sarana yang mempertemukan kelompok, tetapi menjadi agen yang menegosiasikan konteks kemanusiaan yang lebih luas sehingga mampu mendatangkan

persamaan cara pandang, perspektif yang sama dalam memandang kemanusiaan dan sebagainya. Kondisi ini jelas dapat menjadi salah satu strategi yang mendamaikan dan membangun kehumanisan antarsesama manusia.

Bagi masyarakat pesisir Tanjungpinang, baik di Kelurahan Senggarang maupun Kampung Bugis, di antara aset ruang publik yang mengkonstruksi kesamaan cara pandang dan perkawanan yang harmonis itu adalah *pelataran* dan pasar. *Pelataran* adalah sebuah tempat seperti dermaga, di mana *pelataran* itu jumlahnya cukup banyak yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dari kota Tanjungpinang dan sebaliknya. Masyarakat lebih memilih transportasi laut untuk menghubungkan ke kota daripada jalan darat yang jauh jaraknya. *Pelataran* ini menjulur panjang ke dasar laut tempat sebuah perahu bisa ditambatkan. Keberadaan *pelatar* hampir sama dengan terminal, di mana orang-orang bersama menunggu kedatangan dari perahu-perahu kecil yang akan menyeberangkan ke kota.

Di *pelataran* ini, sambil menunggu perahu datang, mereka bercengkrama bersama yang bisa mempererat hubungan di antara sesama. Pertemuan-pertemuan seperti ini tentu menjadi media integrasi sosial di antara masyarakat setempat. Sekat-sekat sosial terjadi salah satunya diakibatkan oleh tertutupnya kran komunikasi dan tidak adanya media yang dapat membangun masyarakat untuk berkomunikasi.

Begitu pula dengan keberadaan pasar tradisional yang mempertemukan mereka. Ada satu pasar tradisional yang ramai dikunjungi setiap pagi oleh masyarakat Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis. Letak pasar tradisional itu di perbatasan antara kedua kelurahan tersebut. Pasar ini telah berkontribusi menjadi ruang terbuka yang mempertemukan antara dua etnik di wilayah multietnis itu.

Di pasar biasanya mereka tidak sekadar membeli keperluan, tetapi ada kegiatan lain yang terjadi di mana satu sama lain saling bercengkrama setelah membeli keperluan yang dibutuhkan. Kadang-kadang cengkrama

dilakukan di pinggir jalan, di tempat-tempat parkir, atau di kedai-kedai minum sehingga eksistensi pasar tersebut hampir sama dengan kedai kopi yang dikonstruksi oleh laki-laki. Pasar membantu masyarakat untuk sering melakukan komunikasi sehingga semakin mudah pula terwujudnya saling memahami kondisi dan keadaan orang lain.

Di samping itu pasar juga tempat orang-orang menunjukkan empati. Seperti jika terjadi kemalangan atau duka, secara spontan orang-orang di pasar mengumpulkan derma untuk dapat disumbangkan kepada yang membutuhkan. Dalam konteks ini, pasar bukan sekadar sebagai tempat perjumpaan untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan individual saja, tetapi juga menjadi salah satu agen harmonis dalam masyarakat yang beragam.

Bahasa Toleransi

Bahasa menjadi salah satu andalan dalam membangun kesepahaman dalam perkawanan. Hal ini tidak dapat disangkal bahwa dengan adanya bahasa manusia di bumi hidup secara baik dan beradab. Untuk itu bahasa perlu terkonstruksi dengan baik dan beradab pula. Di Malaysia, secara tegas bahasa dinyatakan sebagai budi bangsa, secara langsung atau tidak bahasa harus dikonstruksi menjadi budi bangsa dengan kesantunan. Bagi orang Melayu pun bahasa itu dinyatakan dalam nukilan sebagai berikut, */yang merah adalah saga/ yang kurik adalah kundi/ yang indah adalah bahasa/ yang baik adala budi/*.

Dalam membangun toleransi, bahasa pun bisa menjadi alat untuk mewujudkan itu. Hal ini dapat dilihat dari cara-cara orang-orang Melayu dan Cina berbahasa di Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis. Ada bahasa toleransi yang dibangun di antara mereka. Bahasa toleransi itu terlihat dari penghargaan terhadap bahasa dari masing-masing etnik itu kepada bahasa di luar etniknya, seperti orang Melayu bisa berbahasa Cina ketika berada bersama dengan etnik itu. Begitu pula sebaliknya orang Cina dapat berbahasa Melayu ketika berada di lingkungan Melayu sehingga dengan penguasaan bahasa-bahasa lintas etnik itu menjadi perekat sosial

di antara mereka. Orang-orang tidak tersegregasi oleh bahasa, tetapi bahasa tersebut bisa menjadi media yang bisa membangun keharmonisan. Orang-orang Melayu ketika berada bersamaan dengan etnik Cina tidak menunjukkan superioritas dengan bahasa etniknya, sebaliknya orang Cina pun tidak memaksakan bahasanya ketika bersamaan dengan orang Melayu. Ada komitmen terselubung dalam tata budi berbahasa dalam kelompok etnik ini; satu dengan yang lainnya tidak membangun superioritas dalam berbahasa. Kesadaran berbahasa yang demikian, menurut Habermas¹⁹ tidak hanya dibangun dengan pragmatisasi, tetapi ada nilai-nilai fungsional yang dibangun melalui bahasa itu.

Selanjutnya kooptasi dalam berbahasa akan melahirkan resistensi, artinya jika ada kekuasaan atau ketentuan yang dilakukan untuk berbahasa dominasi etnik maka eksistensi bahasa akan dapat menjadi bumerang dalam kehidupan. Bahasa dominasi yang digerakkan dalam proses perkawanan itu akan menjadi ancaman dalam keberagaman, bukan menjadi perekat toleransi.

Kesimpulan

Keberagaman dalam berbagai hal, termasuk etnik, agama, suku, ras dan seterusnya tidak selalu menjadi ancaman terhadap keharmonisan tetapi juga menjadi bernilai positif dan berguna untuk kemajuan. Hal demikian bisa terwujud apabila ada toleransi di dalamnya. Toleransi bisa dibangun melalui sikap dan tindakan, serta melalui pemeliharaan aset-aset kultural yang ada dalam suatu masyarakat.

Di dalam masyarakat Kelurahan Kampung Bugis dan Kelurahan Senggarang dimana masyarakatnya yang terdiri dari berbagai etnik dan agama, bisa membangun toleransi itu dengan berbagai konstruksi kultural, di antaranya melalui interaksi di kedai kopi, pasar dan *pelataran*, bahasa, elite, bahkan juga melalui perkawinan. Konstruksi-konstruksi toleransi itu, ternyata telah melahirkan kehidupan sosial yang harmonis di antara

¹⁹ Ritzer & Smart, *Teori Sosial...*, h. 399-400.

Silfia Hanani: *Studi Negosiasi Kultural.....*

etnik-etnik yang beragam. Bagi mereka keberagaman bukanlah ancaman, tetapi sebuah berkah yang justru memicu perdamaian.

Daftar Pustaka

- Gandhi, Mohandas Karamchand, *Semua Manusia Bersaudara: Kehidupan dan Gagasan Mahatma Gandhi Sebagaimana Diceritakannya Sendiri*, terj. Kustiniyati Mochtar, Cet. II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991.
- Hanani, Silfia, *Renai, Model Kontruksi Antar Umat Pemeluk Agama Mayoritas dan Minoritas Pada Masyarakat Perkotaan Kota Padang Panjang Sumatera Barat*, Salatiga: Percik, 2011.
- Hanani, Silfia, *Sosiologi Pendidikan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Arruz Media, 2013.
- Hanani, Silfia, Proceeding AICIS 2014, “Toleransi dalam Perbedaan Studi Kontruksi Toleransi Umat Beragama di Pengungsian Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara”, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/17131/>.
- Johnson, Paul Doyle, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Maunati, Yekti, *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Puslit Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama RI, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013
- Ritzer & Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana. 2005.
- Ritzer & Smart, *Teori Sosial*, Jakarta: Nusa Media, 2012.
- Sutrisno & Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kansius, 2005
- Ting-Toomey, Stella, *Communicating Across Culture*, New York: The Guildford Press, 1999.
- [https://m.tempo.co/read/news/2014/04/15/078570722/245-kasus-intoleransi-di-indonesia-dalam-setahun akses 19/1/2017](https://m.tempo.co/read/news/2014/04/15/078570722/245-kasus-intoleransi-di-indonesia-dalam-setahun akses%2019/1/2017).
- <http://www.rmol.co/read/2016/01/18/232442/Kasus-Intoleransi-Pada-Tahun-2015-Meningkat>.